KELOMPOK ETNIS DALAM POLITIK ELEKTORAL

Pola Keterlibatan, Interaksi, Komunikasi Kerukunan
Diantara Kelompok Etnis Pendukung Calon Kepala Daerah

Penulis;

**Humaizi
Ermansyah
Rudi Salam Sinaga**

LEMBAGA KAJIAN ILMU SOSIAL DAN POLITIK

KELOMPOK ETNIS DALAM POLITIK ELEKTORAL

Pola Keterlibatan, Interaksi, Komunikasi Kerukunan
Diantara Kelompok Etnis Pendukung Calon Kepala Daerah

Penulis

Humaizi
Ermansyah
Rudi Salam Sinaga

LEMBAGA KAJIAN ILMU SOSIAL DAN POLITIK

**KELOMPOK ETNIS DALAM POLITIK
ELEKTORAL: Pola Keterlibatan, Interaksi,
Komunikasi Kerukunan Diantara Kelompok Etnis
Pendukung Calon Kepala Daerah.**

Humaizi
Ermansyah
Rudi Salam Sinaga

Diterbitkan oleh :
Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik
(LKISPOL)

Jl. Eka Prasetya No. 61
Kecamatan Sunggal
Kabupaten Deli Serdang
Kode Pos 20351
Telp/Fax : 081376883177
Email : lkispol_press@yahoo.co.id
www.lkispol.or.id

Penyunting : Rudi Salam Sinaga
Desain Cover dan Layout : Rudi Salam Sinaga

Cetakan Pertama Oktober 2017

ISBN : 978-602-14885-9-1
Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penulis
atau penerbit.

Isi buku diluar tanggung jawab penerbit.

BAB. 1

PENDAHULUAN

Heterogenitas Sosial di Dalam Negara Demokrasi.

Hampir dapat dikatakan setiap negara dibelahan dunia manapun memiliki karakteristik demografi yang heterogen. Heterogenitas sosial yang mencakup keberagaman agama, etnis, budaya bahkan bahasa lokal yang beragam tidak dapat dihindari karena merupakan konsekuensi dari kemunculan peradaban yang berkaitan dengan perpindahan penduduk di masa lalu karena sebab akibat pemenuhan kebutuhan hidup, korban konflik ataupun sebagai akibat dari pengaruh peradaban yang sedang berkembang di waktu tertentu sehingga membentuk peradaban baru.

Dalam negara demokrasi yang multietnis dan multiagama cenderung dapat mengalami gesekan sosial. Gesekan sosial tersebut dapat muncul bila setiap kelompok berhadapan dengan kepentingan yang berbeda. Politik elektoral sebagai salah satu potensi munculnya kerawanan konflik antar pendukung dan pada akhirnya mengangkat sentimen kolektif etnis. Masalah seperti ini dapat muncul

dalam volume yang kecil, sedang hingga besar. Ketegangan antar kelompok etnis yang seringkali pada akhirnya bermuara pada isu agama. Kawasan perbatasan daerah tidak jarang menimbulkan konflik sosial untuk mengantisipasi kondisi seperti ini terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan seperti yang diusulkan Keawsonnuk (2017: 1-8) dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat etnis di daerah perbatasan melalui manajemen kurikulum pendidikan yang terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal.

Etnis adalah sekelompok masyarakat yang memiliki budaya, organisasi sistem sosial, identitas (seperti bahasa), seperangkat nilai dan memiliki batas-batas identitas dari kelompok etnis lainnya (lihat Barth, 1969: 10-20). Dalam studi ilmu sosial terutama antropologi dan sosiologi menganggap pendekatan budaya termasuk sebagai pendekatan yang “kuat” untuk memulai interaksi sebagaimana Retsikas (2007: 183) meyakini budaya sebagai sumber daya. Dengan memahami budaya suatu kelompok etnis maka mempermudah untuk bisa masuk kedalam kelompok tersebut untuk melakukan interaksi.

Kelompok etnis mampu mengakumulasi sumber daya yang ada di dalam kelompok mereka ke arah nilai yang positif maka kemajuan demi kemajuan akan

menghampiri kelompok etnis tersebut. Besarnya kekuatan sumber daya yang melekat dalam budaya membuat kelompok etnis menjadi perhatian aktor politik di arena politik elektoral. Sumber daya tersebut tidak hanya terletak pada jumlah populasi namun lebih besar dari itu kolektifitas kelompok etnis dapat dipergunakan untuk mempengaruhi lingkungan sekitar dengan cara yang cepat melalui menggerakkan struktur sosial dalam sistem kekerabatan etnis.

Heterogenitas sosial sebagai keberagaman masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai universal demokrasi seperti persamaan hak bagi setiap warga dan demokrasi memberikan akses kepada warga untuk meraih kepentingan mereka melalui konsep lembaga perwakilan dimana setiap warga berhak mengkonsultasikan kepentingan mereka untuk diperjuangkan melalui wakil mereka di lembaga perwakilan (legislatif).

Etnisitas Dalam Politik Elektoral

Tidak dapat dihindari bahwa pembentukan suatu negara berasal dari tindakan kolektif yang terbentuk atas kesadaran suatu bangsa yang di dalam bangsa tersebut melekat identitas warga yang berbeda seperti agama dan etnis. Etnis yang identik dengan asal geografis wilayah

memiliki sejumlah identitas yang melekat didalamnya berupa bahasa, adat istiadat, tarian dan bahkan filosofi dalam memaknai kehidupan.

Dalam studi literatur kajian terhadap etnisitas telah banyak ditulis ke dalam bentuk buku maupun hasil penelitian seperti kajian-kajian yang dilakukan oleh ilmu antropologi dan sosiologi, kebanyakan dari kajian-kajian ini telah memberikan kontribusi bagi kita untuk dapat memahami etnisitas dalam perspektif sosial berupa sistem sosial, interaksi, ritual adat dan lain sebagainya.

Buku ini berdiri pada perspektif politik untuk memahami etnisitas terutama dalam keterlibatan etnisitas di politik elektoral (pemilihan umum, pemilihan kepala daerah). Pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk menggugah minat kita terhadap studi etnisitas dalam politik elektoral seperti 1) mengapa orientasi kelompok etnis bergeser dari orientasi sosial ke orientasi politik menjelang momentum politik elektoral, 2) mengapa kelompok etnis melibatkan diri lebih dalam dalam politik elektoral dengan menjadi kelompok pendukung kontestan dan 3) apa sesungguhnya orientasi politik kelompok etnis yang terlibat menjadi kelompok pendukung kontestan dalam politik elektoral.

Pertanyaan ini setidaknya telah menggugah kita

untuk dapat memulai studi terhadap etnisitas dalam politik elektoral, studi ini akan memiliki kontribusi yang berdampak terhadap pembentukan konstruksi perspektif baru untuk melihat eksistensi kelompok etnis yang tidak hanya memiliki kekuatan sosial namun juga memiliki kekuatan politik yang dapat mempengaruhi hasil suara partai di Pemilu dan mempengaruhi kebijakan publik.

Literatur buku yang mengangkat mengenai keterlibatan etnis dalam politik elektoral (Pemilu) bisa ditelusuri dengan membaca karya buku dari (Birbir, 2007) yang berjudul "*Ethnicity and Electoral Politics*", karya buku ini merupakan hasil studi penelitian yang dilakukan Brinir di Negara Rumania dan beberapa negara demokrasi di Eropa dan Asia, studi Birbir berusaha untuk menjawab pengaruh pembelahan etnis terhadap perkembangan demokrasi, bagaimana kelompok etnis mempengaruhi demokrasi dan apa pengaruh kelompok etnik terhadap pembangunan demokratik selanjutnya. Beberapa hasil temuan penelitian ini menemukan partisipasi politik etnis sangat dipengaruhi sejauhmana kepentingan kelompok etnis diwakili dalam pemerintahan.

Literatur buku berikutnya ditulis oleh Elischer (2013) dengan judul buku "*Political Parties in Africa: Ethnicity and Party Formation*", buku yang merupakan hasil

penelitian ini mengangkat pengaruh etnisitas terhadap partai politik di Afrika. Studi yang dilakukan Elischer menemukan di negara-negara yang memiliki kelompok etnis inti cenderung membentuk partai politik non etnis, sementara negara-negara yang tidak memiliki kelompok etnis inti cenderung membentuk partai politik etnis.

Dalam tataran literatur kajian empiris berbentuk disertasi dapat membaca karya disertasi Taylor, 2016; Ruedin, 2009; Vogt, 2013; Inman, 2013; Batta, 2013; Morales, 2008; Adolino, 1993). Sejumlah artikel penelitian yang berkaitan dengan tema etnisitas dalam politik elektoral ditulis Elling (2015); Horowitz & Long (2016); Manzano & Sanchez (2010); Fisher, Heath, Sanders, & Sobolewska (2014); Kubo (2007); Yusof, Abdullah, & Ahmad (2014); Dionne (2014) dan masih begitu banyak artikel penelitian lainnya.

Dalam konteks Indonesia kajian serupa dapat membaca artikel dari Miichi (2014), Miichi mengangkat peran agama dan etnis dalam pilkada Kota Jakarta tahun 2012, studi ini mencoba untuk melihat batas diantara etnis dan agama dalam mempengaruhi hasil pilkada Jakarta. Penelitian dari Prasetyawan (2014) mengangkat mengenai dinamika etnisitas dan politik dalam pemilihan gubernur Kota Jakarta tahun 2007 dan 2012 dan

berpendapat etnisitas memiliki peran untuk mempengaruhi pemilihan meski tidak signifikan. Kedua penelitian ini menandai adanya pengaruh yang diberikan dari dimensi etnisitas terhadap politik elektoral di daerah dengan demografi multikultural.

Dari telaah terhadap sejumlah kajian empiris yang berhasil ditemukan mengantarkan pada satu pendapat bahwa kelompok etnis dapat diperankan untuk memperkuat peluang perolehan suara partai sekaligus sebagai “mesin” partai di tingkat “akar rumput” yang bekerja mengawal tujuan-tujuan politik partai. Hal ini dapat terjadi ketika partai dan kelompok etnis dapat menegosiasikan kepentingan politik diantara mereka.

Pada daerah yang lebih sempit demografi multi etnisnya atau pada daerah yang memiliki etnis mayoritas seperti provinsi Aceh dari penelitian Hillman (2012) menunjukkan kemenangan partai Aceh di tahun 2009 sebagai representasi pilihan dari kelompok etnis.

Sejumlah penelitian di atas mengambil posisi penelitian untuk mengamati partisipasi politik kelompok etnis dalam politik elektoral di sejumlah negara termasuk dalam area negara Indonesia. Makna yang dapat di petik dari sejumlah kajian penelitian tersebut mengarahkan bahwa kelompok etnis mampu menampilkan kekuatan

politik mereka di ranah politik elektoral bila mereka berkehendak. Kehendak tersebut dapat muncul bila berkaitan dengan kepentingan politik mereka yang “terganggu” atau dirasa perlu untuk meraih suatu kepentingan seperti keterwakilan politik mereka dalam struktur kekuasaan politik atau sebab yang paling ekstrim dikarenakan perlakuan diskriminasi yang mereka rasakan dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam area Indonesia, pasca gerakan reformasi persoalan diskriminasi telah selesai dalam konteks perdebatan dan dalam konteks regulasi (peraturan perundang-undangan) telah menegaskan persamaan hak bagi setiap warga dalam berbagai bidang kehidupan. Namun dalam konteks keterwakilan politik, demokrasi Indonesia masih menekankan pada aspek persamaan hak di bidang politik dan belum terarah pada isu keterwakilan politik secara deskriptif sebagaimana Hanna Fenichel Pitkin menjelaskan keterwakilan deskriptif dalam bukunya berjudul “The Concep of Political Representation” , keterwakilan deskriptif adalah keterwakilan dari berbagai nilai untuk menghindari konflik (Pitkin, 1967: 213). Konsep keterwakilan deskriptif yang diberikan oleh Pitkin mengarah pada terakomidirnya keterwakilan politik dari berbagai kelompok warga yang dapat berdasarkan etnis,

agama, profesi dan lain sebagainya yang ada dalam suatu daerah pemilihan. Karena pada setiap kelompok warga memiliki nilai yang berbeda dan kepentingan yang berbeda maka keterwakilan mereka dalam politik penting untuk di akomodir.

Dalam lingkup area Indonesia, isu keterwakilan deskriptif belum menjadi perhatian penting, setidaknya hal itu belum ditekankan dalam peraturan perundang-undangan. Penekanan saat ini masih fokus pada bagaimana meningkatkan keterwakilan politik kaum perempuan dalam politik oleh karena itu undang-undang di Indonesia mewajibkan kuota 30 % kaum perempuan dalam daftar calon legislatif di tiap partai politik.

Fenomena etnisitas dalam politik yang ditandai oleh kemunculan keterlibatan kelompok etnis dalam politik elektoral dalam area Indonesia apakah sebagai pertanda bahwa isu keterwakilan politik berdasarkan kelompok etnis sudah menguat dalam arena praktis? ataukah kelompok etnis hanya sekedar memberikan pertanda untuk mendapatkan “pengakuan” lingkungan secara politis? Studi yang lebih sempit dan terbatas pada area tertentu akan dilakukan untuk dapat memahami apa sesungguhnya makna di balik keterlibatan kelompok etnis dalam arena politik elektoral, studi terhadap keterlibatan beberapa

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Yustia Atsanatrilova, Potret Pribumi Dalam Kontruksi Sosial Warga Etnis Tionghoa Surakarta Pasca Kerusuhan Mei 1998. Tesis, Pascasarjana Sosiologi, Universitas Gadjah Mada
- Adrian, Fikri. 2013. "Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah; Studi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012. Skripsi. Program Studi Ilmu Politik: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah-Jakarta.
- Adolino, J. R. (1993). *Representation and political Integration: Ethnic Minority Local Councillors in Britain. Dissertation.* The Ohio State University.
- Badaruddin. "Modal Sosial (Social Capital) dan Pemberdayaan Komunitas Nelayan", dalam M. Arief Nasution, Badaruddin, Subhilhar, (Editor). 2005. *Isu-isu Kelautan : Dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Baradei, L. El, & Wafa, D. (2013). Parliamentary Elections Egypt 2011: A Multi-Stakeholder Groups Assessment. *Journal of US-China Public Administration*, 10(9), 860–885.
- Barth, F. (1969). *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference.* Boston: Little, Brown and Company. Retrieved from <http://www.urbanlab.org/articles/Barth>, Fredrik

Buku ini merupakan hasil riset dengan mengambil fokus perhatian terhadap eksistensi kelompok etnis di Kota Medan yang sejak era pasca reformasi telah memainkan peranan penting dalam dimensi politik elektoral.

Fenomena keterlibatan kelompok etnis dalam politik elektoral di Kota Medan memberikan perspektif baru untuk memahami kelompok etnis yang sebelumnya beraktivitas dalam bidang sosial dan kini aktivitas mereka telah bergeser ke bidang politik. Pergeseran kondisi ini menjadi menarik untuk ditelusuri terlebih lagi dalam konteks Kota Medan keterlibatan kelompok etnis dalam pilkada tidak menimbulkan gesekan sosial dalam kehidupan bermasyarakat di waktu menjelang dan sesudah pilkada dilaksanakan. Terdapat nilai luhur yang melekat dalam setiap kelompok etnis dan membentuk prilaku politik yang santun sebagai pedoman interaksi dan komunikasi pada Paguyuban Suku Tionghoa Indonesia dan Paguyuban Joko Tingkir.

Dr.Humaizi, MA adalah staff pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara-Medan. Menempuh Pendidikan S3 Ilmu Komunikasi Islam UIN SU (2015).

Drs. Ermansyah, M.Hum. merupakan staff pengajar di Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara-Medan. Menempuh Pendidikan S2 di Antropologi Universitas Gadjah Mada (1998).

Rudi Salam Sinaga, S.Sos.,M.Si adalah staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Menempuh pendidikan S2 di Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro (2011) dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Diponegoro.

LEMBAGA KAJIAN ILMU SOSIAL DAN POLITIK

ISBN : 978-602-14885-9-1

9 786021 488591